



Bahas APBD 2025, Fraksi Demokrat Tampil Tegas

MANADO—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Henry Walukow menegaskan pentingnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 bersifat pro-rakyat.

Hal ini disampaikannya dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat paripurna pada Jumat (22/11).

"APBD harus benar-benar pro kepada rakyat, terutama dalam sektor-sektor utama seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bu-

daya, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Semua itu harus terakomodasi dalam APBD 2025," kata Henry Walukow, yang juga merupakan politisi Partai Demokrat.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Minut-Bitung sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Sulut, Walukow menyoroti DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui APBD yang disusun.

"Jangan sampai karena keterbatasan waktu atau tekanan tertentu, kepentingan rakyat dikorbankan. APBD

adalah instrumen penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulut," tegasnya.

Henry juga menyatakan komitmen Fraksi Partai Demokrat untuk mengawal setiap kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat, terutama dalam bidang bantuan sosial. "Kami akan terus mengawasi agar bansos dan alokasi anggaran lainnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.

Politisi yang dikenal vokal dalam memperjuangkan hak rakyat ini menambahkan,

penganggaran yang tidak tepat sasaran akan merugikan masyarakat, sehingga ia mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD 2025 dapat bekerja secara transparan dan adil.

APBD 2025 diharapkan tidak hanya mencakup program-program jangka pendek tetapi juga menjadi fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Utara. "Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait anggaran," pungkasnya. (get)